

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV, Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ana Silviana, Teori Dan Praktek Pendaftaran Tanah, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010
- Arba, H. M. (2015). Hukum agraria Indonesia. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Cetakan ke-10, Jakarta: Djambatan, 2008.
- B., R. Sabrina Dhea. Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat Ganda Terhadap Hak Atas Tanah pada Kasus yang Terjadi di Kabupaten Pemalang. Skripsi. UAJ:Yogyakarta. (2021).
- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: Kompas Gramedia, 2008.
- Mario Mulyadi, Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Universitas Diponegoro, 2019.
- Marzuki, P. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana. Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, 2008.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Bandung: Nusa Media, 2016, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien.
- Harsono, B. (2005). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Santoso, Urip, 2009, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 359-360.
- Suratman dan H. Philips Dillah, (2020), Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. Sertipikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika, 2014
- Suparyanto dan Rosad, Teori Kepastian Hukum, 2020.

- Supriadi. (2010). Hukum agraria (cet. ke-4). Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Syarief, Elza. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah. Cet. I. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tatu Afifah, Pelepasan Hak Milik Atas Tanah dalam Rangka Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Kabupaten Serang, Tesis, Universitas Indonesia, 2010.
- Urip Santoso, (2011), Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

## **B. Jurnal**

- Annisa Shafarina Ayuningtyas, Rosita Candrakirana & Fatma Ulfatun Najicha Pena Justisia: Vol.19, No.2, December, 2020 JURNAL DISCRETE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.
- Ardiles Eric Panget. “Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Hak Milik Ganda.” Jurnal Ilmu Hukum, vol. Vol.I/No.3, 2013.
- Gita Alyosha Putu Wikasulanda, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 26/Pdt.Eks/2009/PN. Bjb),” Lambung Mangkurat Law Journal, 2017
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Embodying Green Constitution by Applying Good Governance Principle for Maintaining Sustainable Environment”, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 11, 2013.
- Irfan Iryadi, (2020), Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara, Jurnal Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, (2020) 11:1.
- Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Adi Sulistiyono, “Setting of Plantation Land Area Limitation Based on Social Function Principles of Land Cultivation Rights to Realize Social Welfare-Promoting Plantation”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17 No. 1, 2017.
- Murni, C. S. (2018). Peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2).
- Mustarin, B. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 4(2), 397-412.
- Nurhayati. A. “Fungsi Pendaftaran Tanah Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Menurut Upa Tahun 1960.” Jurnal Warta, vol. Edisi : 60, 2019.
- R. La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance”, Journal of Financial Economics, Vol. 58, No. 1, January 2000.

### **C. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.

Putusan Nomor 62 /G/2019/PTUN.PBR

Putusan Mahkamah Agung Nomor 473 K/TUN/2020

